
Adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Transformasi Layanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang

Ocha Oktavia Ramadhani¹, Anindya Maya Azizah², Agna Deffira Hidayati³,
Fikri Choirul Umam⁴, Adam Ghani⁵, Reza Noormansyah⁶

Universitas Tidar, Indonesia

Email Korespondensi: ocha.oktavia.ramadhani@students.untidar.ac.id anindya.maya.azizah@students.untidar.ac.id
agna.deffira.hidayati@students.untidar.ac.id fikri.choirul.umam@students.untidar.ac.id
adamghani230@students.untidar.ac.id reza.noormansyah@untidar.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has encouraged governments to deliver public services that are more efficient, accessible, and responsive to citizens' needs. In population administration, the Digital Population Identity (IKD) represents an important innovation supporting the digital transformation of public services. This study aims to examine the level of IKD adoption in Magelang City, identify factors that facilitate and hinder its implementation, and formulate strategies to enhance IKD adoption in a sustainable manner. A qualitative research method with a grounded theory approach was employed, using observations and interviews conducted at the Population and Civil Registration Office of Magelang City. The findings reveal that IKD implementation through the 'PESAN TAS KANDI' innovation has exceeded the national activation target, reaching an adoption rate of over 37 percent. The adoption of IKD has delivered tangible benefits, including improved service efficiency, shorter waiting times, easier access to public services, and increased security and accuracy of population data. Nevertheless, several challenges persist, such as limited ownership and compatibility of digital devices, uneven levels of digital literacy among citizens, and the incomplete integration of IKD across public service sectors. This study concludes that strengthening IKD adoption requires continuous public outreach, proactive mobile service initiatives, greater engagement of the productive-age population, and consistent monitoring and evaluation to support inclusive and sustainable digital public service transformation.

Keywords: Digital Population Identity, Digital Transformation, Public Services, Technology Adoption.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Dalam konteks administrasi kependudukan, Identitas Kependudukan Digital (IKD) hadir sebagai inovasi untuk mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat adopsi IKD di Kota Magelang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan adopsi IKD secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory melalui observasi dan wawancara di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD melalui inovasi PESANTAS KANDI mampu melampaui target nasional dengan tingkat aktivasi lebih dari 37 persen. Adopsi IKD terbukti memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan efisiensi pelayanan, pengurangan waktu tunggu, kemudahan akses layanan, serta peningkatan keamanan dan akurasi data kependudukan. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kepemilikan dan kompatibilitas perangkat, perbedaan tingkat literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan IKD di seluruh layanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan adopsi IKD memerlukan strategi sosialisasi yang berkelanjutan, pelayanan jemput bola, penguatan peran kelompok usia produktif, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten untuk mewujudkan layanan publik digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Transformasi Digital, Pelayanan Publik, Adopsi Teknologi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mengakibatkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek di kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju pelayanan yang lebih efisien, efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Natika, 2024). Dalam konteks administrasi kependudukan, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak guna mengatasi permasalahan pelayanan seperti prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, inefisiensi birokrasi, serta kesenjangan akses layanan.

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap transformasi digital pelayanan publik tercermin dalam berbagai regulasi strategis, antara lain Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional. Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar bagi instansi pemerintah dalam mengembangkan layanan publik berbasis digital secara terintegrasi. Transformasi digital dalam administrasi kependudukan memiliki urgensi tinggi karena pelayanan ini berkaitan langsung dengan seluruh warga negara sejak lahir hingga meninggal dunia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan kependudukan melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi suatu keharusan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berbasis digital, dengan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD).

IKD dikembangkan sebagai respons terhadap beberapa permasalahan dalam pelayanan kependudukan, seperti keterbatasan blangko e-KTP, tingginya biaya produksi kartu fisik, serta keterbatasan akses layanan yang mana masyarakat harus datang ke Kantor. Tiga fungsi utama IKD dijelaskan oleh (Yulianti.et.al.,2025) yaitu: pertama, memastikan identitas melalui verifikasi data identitas; kedua, autentikasi identitas melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code; dan ketiga, otorisasi identitas, yang memberikan hak kepada pemilik IKD untuk mengakses dan mengelola data identitas mereka. (Irma Nurdiana 2024) menambahkan IKD juga melakukan konfirmasi kepemilikan melalui verifikasi vektor identitas. IKD menawarkan kemudahan akses, efisiensi anggaran, percepatan pelayanan, serta sistem keamanan digital yang lebih baik dibandingkan dengan e-KTP fisik. Antusiasme masyarakat terhadap IKD cukup tinggi, ditunjukkan dengan jumlah unduhan aplikasi yang telah mencapai lebih dari 10 juta serta penilaian aplikasi sebesar 3,2 dari 5,0 pada platform digital, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan (Kementerian Dalam Negeri, 2023).

Meskipun infrastruktur di Kota Magelang lebih baik dibandingkan daerah lain, Kota Magelang masih ada masalah untuk adopsi IKD. Kota Magelang, yang terdiri dari berbagai kelompok dengan tingkat literasi digital yang berbeda-beda, diperlukan strategi pendekatan yang menyeluruh. Misalnya, orang tua mungkin memerlukan bimbingan khusus untuk menggunakan IKD. Orang-orang yang berpendidikan rendah atau tidak terbiasa menggunakan smartphone mungkin memerlukan bimbingan khusus. Pengalaman Disdukcapil Kota Magelang dalam mengimplementasikan inovasi layanan kependudukan sebelumnya, seperti SI SAKTI dan SI BULAN, menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik dapat berhasil apabila didukung oleh strategi yang tepat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam mendukung implementasi dan peningkatan adopsi IKD secara berkelanjutan.

Penelitian tentang peningkatan adopsi IKD di Kota Magelang menjadi sangat penting dan mendesak karena berbagai faktor tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi adopsi IKD saat ini, menemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung adopsi IKD, dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan adopsi IKD. Pada akhirnya, penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan layanan publik di Kota Magelang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang mendalam dan kompleks, melaporkan perspektif terinci dari sumber informan, dan melakukannya dalam lingkungan alami (Walidin.et all, 2015: 77 dalam (Fadli 2021)). Penelitian kualitatif bertujuan

untuk menemukan dan menceritakan kegiatan yang dilakukan serta bagaimana kegiatan tersebut berdampak pada kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis Grounded Theory. Grounded Theory merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merumuskan dan mengembangkan teori secara sistematis berdasarkan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Pendekatan ini tidak berangkat dari kerangka teori yang telah mapan, melainkan membiarkan konsep, kategori, dan hubungan antarkonsep muncul secara alami dari data yang dikumpulkan melalui proses pengamatan, wawancara, dan analisis berulang. Dengan demikian, teori yang dihasilkan dalam penelitian grounded theory bersifat kontekstual, reflektif terhadap realitas yang diteliti, serta mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan makna yang diberikan oleh subjek penelitian (Waruwu, 2024). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang. Adapun lingkup lokasi penelitian mencakup seluruh wilayah administratif Kota Magelang yang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, dan Kecamatan Magelang Selatan. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai sebaran adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di seluruh wilayah Kota Magelang. Sementara itu, waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama mengikuti magang, terhitung mulai dari 1 Oktober 2025 sampai dengan 12 Desember 2025. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam terkait peningkatan adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam rangka transformasi layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara, yang saling melengkapi satu sama lain guna meningkatkan kesesuaian data penelitian. (1) Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses pelayanan administrasi kependudukan serta implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Observasi dilaksanakan secara langsung dengan jenis observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat dalam aktivitas pelayanan, melainkan hanya melakukan pengamatan secara sistematis. Fokus observasi meliputi alur pelayanan, mekanisme penerapan IKD, interaksi antara petugas dan masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penerapan IKD. (2) Wawancara digunakan untuk memperoleh data kualitatif secara mendalam terkait kebijakan, pelaksanaan, serta kendala dan strategi peningkatan adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang terlibat langsung dalam implementasi IKD. Proses wawancara dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian. Selama wawancara, peneliti melakukan pencatatan guna menjaga keakuratan data. Data hasil wawancara selanjutnya dinarasikan dan dianalisis secara kualitatif. (3) Teknik analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan metode kualitatif. Analisis

data dilakukan secara bertahap untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peningkatan adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam rangka transformasi layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan merangkum data penting yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Triangulasi dilakukan kombinasi data dari tiga sumber utama, yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tidak terstruktur dengan informan pegawai Disdukcapil, dokumentasi peneliti, serta temuan langsung dari observasi terhadap proses pelayanan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diverifikasi secara silang sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan keakuratan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang telah berhasil menerapkan transformasi digital melalui inovasi PESAN TAS KANDI (Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital). Langkah strategis ini dirancang untuk mendukung kebijakan nasional dalam mempercepat integrasi layanan digital melalui pemanfaatan identitas penduduk digital yang berbasis pada smartphone.

Pesan Tas Kandi merupakan singkatan dari Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan menjadi inovasi utama yang disusun oleh Disdukcapil Kota Magelang. Inovasi ini adalah langkah strategis daerah untuk mendukung kebijakan percepatan transformasi digital suatu pelayanan publik yang telah diamanatkan pemerintah pusat. Inti dari adanya suatu inovasi ini yaitu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebuah identitas yang berbasis digital dan disematkan pada smartphone penduduk. IKD sendiri merupakan inovasi berbasis digital yang dimunculkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dengan tujuan utama untuk memudahkan akses dan pengelolaan layanan publik bagi masyarakat, memperkuat keamanan data, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Payung hukum yang menaungi implementasi IKD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Kebijakan pelaksanaan IKD diterapkan untuk seluruh warga yang telah mendaftar untuk kartu identitas

elektronik (KTP-el), atau dengan kata lain, bagi warga yang diwajibkan memiliki kartu identitas (yang berusia 17 tahun ke atas, atau yang berusia di bawah 17 tahun namun sudah menikah). Selain itu, IKD berperan sebagai Single Sign-On (SSO), yang sangat vital untuk mengintegrasikan sembilan layanan digital yang menjadi prioritas nasional, termasuk layanan manajemen penduduk terpadu, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

Dilansir dari website Disdukcapil Kota Magelang, Ditjen Dukcapil Kemendagri menetapkan target cakupan aktivasi IKD kepada setiap Disdukcapil Kabupaten/Kota sebesar 25% pada tahun 2023 dan naik menjadi 30% pada tahun 2024. Melalui pelaksanaan inovasi PESAN TAS KANDI, Disdukcapil Kota Magelang berhasil melampaui target nasional tersebut, di mana capaian aktivasi IKD telah melampaui 30% pada pertengahan tahun 2024 dengan angka 30,15%, dan terus meningkat hingga mencapai 33,94% pada akhir Desember 2024.

Implementasi IKD di Kota Magelang

Tahapan Implementasi IKD

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Magelang tidak sekadar memindahkan data fisik ke dalam aplikasi, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. Sebagai instansi pelaksana, Disdukcapil Kota Magelang telah menyusun rencana aksi yang dituangkan dalam langkah-langkah strategis melalui inovasi unggulan bernama PESAN TAS KANDI (Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital). Inovasi ini dirancang untuk menjawab target ambisius yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan yang lebih responsif, efektif, dan efisien. Untuk memahami bagaimana transformasi ini dijalankan di lapangan, berikut adalah tahapan-tahapan mendalam mengenai implementasi IKD yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Magelang:

Penyusunan Rencana Aksi dan Target Strategis

Disdukcapil Kota Magelang mengawali implementasi dengan menyusun rencana aksi yang sistematis sebagai respons terhadap kebijakan nasional dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Langkah ini mencakup penetapan strategi untuk mencapai target cakupan aktivasi IKD yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Diseminasi dan Sosialisasi Berkelanjutan

Langkah penting lainnya adalah pelaksanaan kampanye kesadaran dan informasi yang luas untuk semua lapisan masyarakat mengenai pentingnya transformasi digital dalam sektor publik. Fokus utama dari kegiatan ini adalah menanamkan pemahaman bahwa kepemilikan IKD sangat membantu masyarakat dalam mengakses data kependudukan secara praktis lewat genggaman smartphone tanpa perlu lagi membawa dokumen fisik, serta memperkenalkan peran IKD sebagai Single Sign On (SSO) untuk mengakses berbagai layanan prioritas nasional.

Pelaksanaan Layanan "Jemput Bola" (PESAN TAS KANDI)

Untuk mempercepat cakupan aktivasi, Disdukcapil menjalankan inovasi PESAN TAS KANDI dengan melakukan kolaborasi aktif bersama para kepala wilayah, yakni Camat dan Lurah. Petugas turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan aktivasi IKD di lokasi yang dekat dengan masyarakat, mulai dari kantor kelurahan hingga menjangkau lingkungan RT dan RW, sehingga hambatan jarak dan waktu bagi penduduk dapat diminimalisir.

Optimalisasi Data dan Fokus pada Penduduk Usia Produktif

Implementasi juga dilakukan dengan memanfaatkan data penduduk yang belum melakukan aktivasi IKD dari Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai basis data sasaran pelayanan agar lebih tepat sasaran. Disdukcapil secara khusus memaksimalkan aktivasi pada penduduk usia muda dan usia produktif yang memiliki tingkat literasi digital lebih tinggi serta sudah terbiasa menggunakan aplikasi pada perangkat smartphone sehari-hari.

Koordinasi Teknis dan Monitoring Evaluasi Berkala

Pemerintah Kota Magelang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selaku pengembang aplikasi IKD untuk memberikan saran dan masukan terkait perbaikan fitur serta fungsionalitas aplikasi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dilakukan proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap layanan PESAN TAS KANDI guna memastikan seluruh target tercapai secara efektif dan mengidentifikasi kendala lapangan sejak dini.

Jumlah Penduduk yang Telah Mengadopsi IKD

Berdasarkan data harian yang dihimpun melalui pemantauan intensif terhadap akun Instagram resmi Disdukcapil Kota Magelang, tercatat dinamika jumlah penduduk yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) selama periode pengamatan kuartal terakhir tahun 2025. Peneliti menetapkan rentang waktu pengambilan data mulai dari tanggal 1 Oktober hingga 19 Desember 2025, di mana pemilihan periode ini disesuaikan dengan masa pelaksanaan magang peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang selama tiga bulan tersebut. Fokus penelitian pada kurun waktu ini bertujuan untuk menyinkronkan data lapangan yang tersedia dengan observasi langsung yang dilakukan peneliti selama bertugas di instansi tersebut.

Selama periode tiga bulan magang ini, tercatat fluktuasi angka aktivasi yang cukup signifikan setiap bulannya. Pada bulan Oktober 2025, terdapat sebanyak 346 penduduk yang melakukan aktivasi, yang kemudian diikuti oleh 283 orang pada bulan November 2025. Memasuki bulan terakhir masa magang, yaitu pada rentang tanggal 1 hingga 19 Desember 2025, tercatat penambahan sebanyak 172 orang. Secara kumulatif, total penduduk yang mengadopsi IKD selama periode magang peneliti berjumlah 801 orang. Angka ini menunjukkan bahwa publikasi harian melalui media sosial Instagram cukup efektif dalam menjaga attensi masyarakat

terhadap inovasi PESAN TAS KANDI, sekaligus menjadi data faktual bagi peneliti dalam menganalisis laju adopsi teknologi digital di Kota Magelang secara real-time.

Tingkat Adopsi IKD oleh Masyarakat

Tabel 1 : Data Statistik Adopsi IKD Periode 1 Oktober - 19 Desember 2025

Bulan (Data Terakhir)	Wajib KTP Sudah Rekam	Target Aktivasi (37%)	Total Aktivasi IKD	Persentase Capaian	Keterangan
Oktober (31 Okt)	99.874	36.953	37.038	37,08%	Mencapai Target
November (28 Nov)	99.926	36.973	37.266	37,29%	Mencapai Target
Desember (19 Des)	99.957	36.984	37.415	37,43%	Mencapai Target

Penjelasan Detail Tiap Bulan

1. Oktober 2025

Hingga akhir Oktober 2025, Kota Magelang mencatatkan 37.038 aktivasi. Kecamatan dengan capaian tertinggi: Magelang Tengah dengan persentase 38,48% (14.553 aktivasi). Kelurahan dengan persentase tertinggi: Kramat Utara (45,17%) dan Magelang (42,41%). Hambatan: Terdapat 1.253 warga dengan HP yang tidak mendukung (support) IKD dan 2.253 warga yang tidak memiliki HP.

2. November 2025

Jumlah aktivasi meningkat menjadi 37.266 pada akhir November. Pertumbuhan: Terjadi peningkatan sebanyak 228 aktivasi baru dibandingkan bulan sebelumnya. Capaian Wilayah: Seluruh kecamatan (Magelang Utara, Selatan, dan Tengah) secara kolektif telah mencapai target di atas 37%. Kecamatan Magelang Utara mencatat persentase 37,32%, meningkat dari 37,04% pada bulan Oktober.

3. Desember 2025 (Hingga 19 Desember)

Data terbaru menunjukkan total aktivasi mencapai 37.415.

Trend Positif: Persentase adopsi terus merangkak naik ke angka 37,43%.

Detail Kelurahan: Beberapa kelurahan menunjukkan angka yang sangat baik, seperti Kramat Utara yang tetap memimpin dengan 45,33% adopsi.

Status Target: Kota Magelang memiliki surplus 431 aktivasi dari target minimal yang ditetapkan.

Persentase Adopsi

Persentase aktivasi terhadap wajib KTP-el naik tiap bulan:

Oktober : 37,08 %

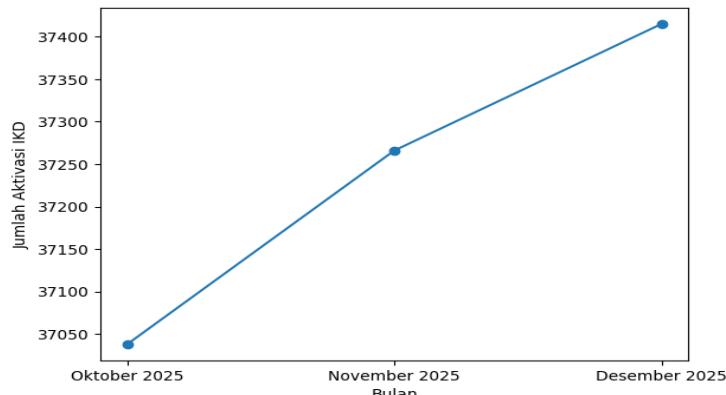
November : 37,29 %

Desember : 37,43 %

(Kenaikan bertahap menandakan tren adopsi yang meningkat, meskipun masih belum mencapai target minimal 37 % di semua kelurahan secara merata).

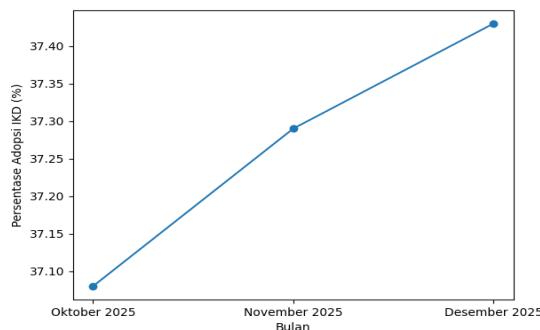
Analisis Adopsi

Data menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Meskipun ada tantangan teknis seperti HP yang tidak mendukung (total 1.256 kasus per Desember) dan warga yang tidak memiliki perangkat HP (2.253 warga), strategi aktivasi tetap berjalan efektif sehingga target tahunan 37% dapat diamankan dan terus ditingkatkan.



Gambar 1: Grafik Tren Bulanan Aktivasi IKD Kota Magelang (Okt-Des 2025)

Grafik pertama menunjukkan peningkatan jumlah aktivasi IKD setiap bulan, dari Oktober ke November hingga Desember 2025. Pola garis yang menanjak mengindikasikan bahwa pelaksanaan aktivasi IKD berjalan konsisten dan mengalami pertumbuhan positif dari bulan ke bulan.



Gambar 2: Grafik Tren Presentase Adopsi IKD Kota Magelang (Okt-Des 2025)

Grafik kedua menggambarkan kenaikan persentase adopsi IKD terhadap total wajib KTP-el. Persentase adopsi meningkat secara bertahap, yang menandakan adanya perbaikan dalam tingkat penerimaan dan pemanfaatan IKD oleh masyarakat, meskipun laju kenaikannya masih relatif moderat. Meskipun mencapai hasil yang signifikan, implementasi PESAN TAS KANDI menemui berbagai tantangan dan permasalahan. Tantangan tersebut meliputi: Tidak semua masyarakat memiliki smartphone, terutama masyarakat berpenghasilan rendah; Tidak semua smartphone yang dimiliki kompatibel dengan aplikasi IKD, yang mensyaratkan spesifikasi minimal Android versi 8 atau iOS versi 11;

Adanya fenomena gagap teknologi (gaptek) di kalangan masyarakat, khususnya penduduk lanjut usia (lansia);

Penggunaan IKD yang membutuhkan paket data atau Wi-Fi;

Belum semua lembaga pelayanan publik mensyaratkan IKD, karena persyaratan pelayanan masih mengharuskan KTP-el fisik; Terdapat warga yang melakukan uninstall aplikasi setelah aktivasi (uninstall/unreg), sehingga menurunkan persentase cakupan IKD yang telah dicapai.

Untuk mengefektifkan transformasi digital melalui IKD, terdapat enam rekomendasi kebijakan yang diajukan:

- (1) Melakukan deseminasi/sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat IKD;
- (2) Bekerja sama dengan Camat dan Lurah untuk melaksanakan pelayanan aktivasi jemput bola hingga ke tingkat RT dan RW;
- (3) Memanfaatkan data penduduk yang belum aktivasi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai sasaran pelayanan PESAN TAS KANDI;
- (4) Memaksimalkan aktivasi IKD pada penduduk usia muda dan produktif;
- (5) Berkordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri selaku pengembang aplikasi IKD untuk pengembangan dan peningkatan manfaat;
- (6) Perlunya monitoring dan evaluasi berkelanjutan dalam pelayanan PESAN TAS KANDI.

Dampak Adopsi IKD terhadap Layanan Publik

Perkenalan Identitas Penduduk Digital (DPO) di kota Magelang melalui proyek inovasi PESAN TAS KANDI telah memberikan sumbangan yang penting terhadap pembaruan cara layanan publik dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat yang berbasis digital. Penerapan teknologi ini tidak hanya mencakup peralihan dari dokumen fisik ke format digital, tetapi juga membangun ekosistem layanan yang lebih terpadu dan aman untuk semua warga. Dengan berhasilnya mencapai target aktivasi nasional di Magelang, manfaat yang baik terlihat baik dalam hal efisiensi administrasi internal maupun kemudahan akses layanan bagi para pengguna. Transformasi ini telah membawa beberapa perbaikan penting dalam kualitas layanan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dapat diuraikan lebih lanjut melalui poin-poin berikut:

Peningkatan Efisiensi Layanan

Adopsi IKD secara fundamental mengubah struktur operasional pelayanan publik dari sistem berbasis fisik yang birokratis menjadi ekosistem digital yang jauh lebih ramping. Efisiensi ini tercermin pada optimalisasi sumber daya di Disdukcapil Kota Magelang, di mana penggunaan formulir kertas, biaya pencetakan, dan kebutuhan ruang arsip fisik dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, prosedur verifikasi identitas tidak lagi memerlukan pengecekan manual yang repetitif karena sistem digital memungkinkan validasi data dilakukan secara otomatis dan terpadu, sehingga produktivitas petugas pelayanan meningkat dalam menangani volume permohonan masyarakat yang tinggi.

Pengurangan Waktu Tunggu

Salah satu dampak paling nyata bagi masyarakat adalah hilangnya antrean panjang yang biasanya terjadi pada proses pelayanan konvensional. Dengan IKD, waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu permohonan layanan publik berkurang drastis karena sinkronisasi data terjadi secara real-time antara aplikasi di gawai penduduk dengan server SIAK Terpusat. Masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama untuk proses otentikasi atau pencetakan kartu fisik, sebab identitas digital yang tersimpan dalam smartphone memiliki validitas yang sama dan dapat langsung dipindai oleh petugas, membuat alur pelayanan menjadi jauh lebih cepat dan responsif.

Kemudahan Akses Layanan 24/7

Transformasi digital melalui IKD menghapus batasan ruang dan waktu dalam pemenuhan hak administratif warga. Melalui aplikasi yang disematkan pada smartphone, penduduk Kota Magelang kini memiliki kendali penuh atas dokumen kependudukannya yang dapat diakses selama 24 jam sehari tanpa harus terikat pada jam operasional kantor dinas. Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat untuk menunjukkan identitas diri atau mengurus keperluan administrasi secara mandiri dalam situasi darurat sekalipun, menjadikannya sebuah solusi layanan

publik yang sangat adaptif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat modern yang serba cepat.

Integrasi Data Kependudukan

IKD bertindak sebagai pusat keterpaduan yang mengoneksikan berbagai elemen data kependudukan ke dalam satu ekosistem digital yang saling terkait. Dampak integrasi ini sangat luas, karena data IKD berperan sebagai sistem satu pintu (single sign-on/SSO), hal ini memungkinkan akses terpadu ke berbagai bidang layanan utama seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Dengan data yang sudah terintegrasi, instansi pemerintah di Kota Magelang dapat saling berbagi informasi secara aman melalui sistem yang tersentralisasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengunggah atau menyerahkan berkas yang sama berulang kali di lembaga yang berbeda-beda.

Peningkatan Akurasi Data

Penerapan sistem IKD meminimalisir risiko kesalahan manusia (human error) yang sering terjadi pada pendataan manual, seperti kesalahan pengetikan atau penggunaan data yang sudah kedaluwarsa. Setiap pembaruan data yang dilakukan di tingkat pusat akan secara otomatis ter-update pada aplikasi IKD milik penduduk, memastikan informasi yang digunakan untuk pelayanan publik selalu akurat dan faktual. Tingkat akurasi yang tinggi ini menjadi aset berharga bagi pemerintah dalam melakukan analisis data untuk perencanaan pembangunan, dan memastikan bahwa distribusi program bantuan sosial dari pemerintah di kota Magelang ditujukan dengan tepat kepada masyarakat yang berhak menerima.

Pengurangan Duplikasi dan Pemalsuan Dokumen

Dari sisi keamanan informasi, IKD memberikan perlindungan berlapis yang jauh lebih kuat dibandingkan dokumen fisik konvensional. Identitas digital ini dilengkapi dengan fitur keamanan mutakhir seperti kode QR dinamis yang berubah secara berkala dan protokol enkripsi data yang ketat, hal ini mengurangi kemungkinan adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan identitas yang sama oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya menjaga privasi dan data pribadi warga dari kejadian siber, tetapi juga memberikan rasa aman kepada penyedia layanan, sebab mereka dapat memastikan identitas setiap individu secara tegas.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Magelang melalui inovasi PESAN TAS KANDI telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang melampaui target nasional adopsi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pelayanan jemput bola hingga ke tingkat lingkungan, serta penentuan sasaran layanan yang lebih terarah, berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk mulai beralih

ke identitas digital. Implementasi IKD tidak hanya mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga memberikan kemudahan akses, meningkatkan efisiensi kerja aparatur, serta memperkuat keamanan dan akurasi data kependudukan. Temuan ini menegaskan bahwa tujuan utama penelitian, yakni memahami tingkat adopsi IKD, faktor yang memengaruhinya, serta kontribusinya terhadap transformasi layanan publik, telah tercapai. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan IKD belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan kepemilikan dan kapasitas perangkat, perbedaan tingkat literasi digital terutama pada kelompok usia lanjut serta belum optimalnya integrasi IKD dalam seluruh layanan publik masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi lanjutan berupa pendekatan sosialisasi yang lebih inklusif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta perluasan integrasi IKD agar dapat dimanfaatkan secara nyata dalam berbagai layanan publik dan nonpublik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam pola penggunaan IKD secara berkelanjutan dan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerimaan identitas digital di tengah masyarakat. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan penelitian, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aviery, Raka Anugrah, and Elly Nielwaty. 2024. "Kualitas Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru." 01(02):135–46.
- Disdukcapil Magelang Kota. (2021). Inovasi Disdukcapil Kota Magelang. Diakses pada 19 Desember 2025, dari <http://disdukcapil.magelangkota.go.id/>.
- Disdukcapil Kota Magelang. (2025). Rekapitulasi Aktivasi IKD 2025. Diperoleh dari data internal bidang PIAK Disdukcapil Kota Magelang.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.
- Fathoni, Mardiansyah. 2025. "Proses Adopsi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Kota Pekanbaru *." (April):326–34.
- Irma Nurdiana, Khithoh Ayumi. 2024. "Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang Implementation Of The Digital Population Identity (IKD) Application At Disdukcapil Tanjungpinang." 1(2).

- Natika, Luki. 2024. "Volume 6 Issue 1, Juni 2024
Http://Ejournal.Unsub.Ac.Id/Index.Php/Publik." 6(1):1-11.
- Prastyo, Y. R., & Sunaningsih, S. N. (2020). Analisis Penerapan Program Inovasi Pada Disdukcapil Kota Magelang Tahun 2020. 8(2), 122-132.
- Salamena, A., & Emanuel, A. (2024). Responsivitas Pelayanan Publik Berbasis E-Government dengan Inovasi Identitas Kependudukan Digital Public Service Responsiveness based on E - Government with Digital Population Identity Innovation. 10, 285-293.
- Yulanda, A., & Adnan, M. F. (2023). Transformasi Digital : Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik. 1(3), 103-110.
- Yulianti, Nimas Agung, Rima Nur Illahi, and Bunga Cantika. 2025. "Model Penerimaan Teknologi Dalam Layanan Kependudukan: Studi Empiris Terhadap Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Garut Technology Acceptance Model in Civil Registration Services : An Empirical Study on the Implementation of Digital Population Identity in Garut Regency." XXI(1):62-86. doi: 10.52316/jap.v21i1.588.